

---

## Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka

Anjelita Liana Risnasari, Andreas Rengga, Elisabet Luju  
Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Maumere  
[Anjelita@gmail.com](mailto:Anjelita@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran Kesejahteraan Masyarakat, Pemanfaatan Dana Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); (2) menganalisis pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga (kk) Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka, sebanyak 428 KK. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 82 orang responden. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik inferensial yaitu regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* dan Uji *F*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kesejahteraan Masyarakat, Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dikategorikan sangat baik. Hasil statistik uji *t* menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat sedangkan variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil statistik uji *F* menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil analisis determinasi menunjukan kedua variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka sebesar 55,4%.

**Keywords :** Pemanfaatan Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Kesejahteraan Masyarakat

---

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi mengandung tujuan yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta membudayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan tersebut berupa dana desa yang merupakan bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan desa melalui pemerintah kabupaten/kota.

Prioritas Dana Desa berdasarkan PERMENDESA PD TT 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Undang-Undang Desa memandatkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan.

Untuk mengoperasikan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan delapan tipologi desa dan delapan belas tujuan SDGs desa sebagai berikut : desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang biasanya dilakukan pada akhir tahun oleh Kepala Desa beserta seluruh jajarannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan merencanakan, mengelola, mengatur, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa dikenal dengan istilah (APBDes).

Desa Iligai merupakan desa yang berada di Kecamatan Lela Kabupaten Sikka dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.502 jiwa dan mempunyai luas wilayah ± 7,08 km<sup>2</sup>. Desa Iligai merupakan desa terkecil di wilayah Kecamatan Lela dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya. Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh pemanfaatan dana desa dan APBDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Iligai, Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

**Tabel 1. Pemanfaatan dana Desa Iligai tahun 2017-2021**

T.A	Penyelenggaraan Pemerintahan (RP)	Pelaksanaan Pembangunan (RP)	Pemberdayaan kemasyarakatan (RP)	Bencana darurat mendesak desa (RP)	Total
2017	281.022.936	530.505.905	444.215.372	12.671.200	1.268.415.413
2018	379.621.993	682.349.018	236.008.982	10.675.050	1.308.655.043
2019	-	697.187.440	179.140.560	-	876.328.000
2020	11.782.870	992.466.310	51.910.920	199.167.900	1.255.328.000
2021	23.941.000	833.014.000	25.061.000	256.021.900	1.138.037.900
Total	696.368.799	3.735.522.673	936.336.834	478.536.050	
Presentase %	8,39%	15,65%	6,24%	1,22%	

*Sumber data : data desa iligai*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, pemanfaatan dana desa untuk lima tahun terakhir sebesar Rp. 5.846.764.356 dan lebih diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan sebesar 15,65% yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik, seperti pembangunan jalan, pembangunan turap, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, pembangunan MCK, sedangkan 6,24% digunakan untuk pemberdayaan kemasyarakatan dan sisanya digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan kemasyarakatan baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya disebuah desa disetiap kabupaten di indonesia, khususnya di Desa Iligai, Kecamatan Lela Kabupaten Sikka dan dalam PERMENDESA PDTT 13 tahun 2020 menjelaskan bahwa undang-undang desa memandatkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Tabel 2. Rincian APBDes Desa Iligai tahun 2017-2021**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pendapatan desa (RP)</b>	<b>Belanja desa (RP)</b>	<b>Pembangunan desa (RP)</b>
2017	1.328.165.445	1.352.776.745	24.611.300.000
2018	1.323.376.734	1.372.865.043	49.488.309.000
2019	1.308.006.889	1.362.135.787	54.128.898.000
2020	1.644.018.409	1.752.807.854	108.726.445.000
2021	1.480.572.438	1.567.220.338	86.647.900.000
Total	4.432.597.736	4.682.163.979	249.503.243.000

*Sumber data : data Desa Iligai*

Berdasarkan uraian tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) dari tahun 2017-2021 mengalami defisit anggaran yang mana selisih antara belanja desa lebih besar dari pendapatan desa. Ini berarti desa tidak bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana desa sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk mengatasi masalah defisit anggaran, maka pemerintah desa mengambil kebijakan mengalokasikan dana tersebut untuk tahun anggaran berikutnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana gambaran mengenai pemanfaatan dana desa, APBDes dan kesejahteraan masyarakat Desa Iligai.
2. Untuk mengetahui apakah dana desa secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Iligai.
3. Untuk mengetahui apakah APBDes secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Iligai.
4. Untuk mengetahui apakah Dana Desa dan APBDes secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Iligai

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Kementerian Keuangan, 2017). Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa. Penggunaan Dana Desa sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukei (2007) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa dapat membiayai Program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 disebutkan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Lili (2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa.

Menurut UU pasal 1 PP 8/2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Tujuan dana desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari APBN kepada Pemerintah Desa. Dana desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran dana desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa maupun oleh kabupaten atau kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

1. Alokasi Dasar
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Indikator pemanfaatan dana desa dapat diukur menggunakan indikator milik (Harjono, dkk (2014) yaitu :

1. Pengalokasian sumber daya  
Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas  
Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **APBDes**

APBDes merupakan suatu perencanaan keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh Karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang suda dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

APBDes pada dasarnya adalah rencana tahunan pemerintah desa. APBDes diukur menggunakan 3 indikator menurut (Sumpeno, 2013) yang terdiri atas

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

2. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pemerataan pembangunan baik di tingkat lokal, nasional maupun di level global. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai.

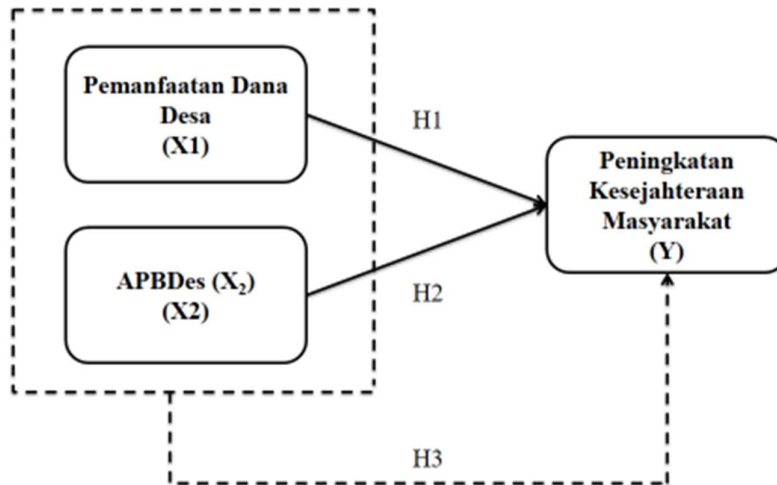
Menurut Fahrudin, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

1. Rasa Aman (*security*)  
Dalam teori Maslow kebutuhan akan rasa aman meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perlindungan, dan sebagainya.
2. Kesejahteraan (*welfare*)  
Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.
3. Kebebasan (*freedom*)  
Menurut Berlin konsep kebebasan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu konsep kebebasan positif dan konsep kebebasan negatif. Konsep kebebasan positif adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut. Sedangkan kebebasan negatif adalah pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun.
4. Jati Diri (*identity*)  
Teori Ekonomi manajemen menjelaskan bahwa jati diri sendiri merupakan bagian dari sifat seseorang yang muncul dengan sendirinya mulai dari kecil, kemudian sifat bawaan kadang juga terpengaruh dengan faktor lingkungan tempat seseorang hidup dan dibesarkan.  
Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014:48) mengandung tiga komponen yaitu :
  1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
  2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
  3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.Sedangkan menurut Kolle, (1974) dalam Bintrato (1989), kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya :
  1. Kualitas hidup dari segi materi, meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan.
  2. Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar.
  3. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas pendidikan
  4. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

### Kerangka Penelitian

Penelitian ini mengembangkan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Hipotesis Penelitian

#### Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. (Asoka, 2018:88). Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Pemanfaatan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian sebelumnya dari Herliani & A. Nurohman (2019) mampu membuktikan bahwa pemanfaatan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan beberapa uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah : H1 (pemanfaatan dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa).

#### Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sumpeno (2011:211) menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. APBDes mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung program pembangunan desa. Program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya dari Arjuna (2019) yang mampu membuktikan bahwa APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan beberapa uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah : H2 (APBDes secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa).

### **Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mensejahterakan masyarakat desa perlu adanya susunan APBDes yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran belanja rutin pembangunan desa sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sumpeno (2011:213).

Pemanfaatan dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian sebelumnya dari Iskandar Arjuna & Yulfan A. Nurohman (2019) mampu membuktikan bahwa pemanfaatan dana desa dan APBDes secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan beberapa uraian di atas, Hipotesis yang dapat dikembangkan adalah : H3 (pemanfaatan dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa).

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Dilihat dari tujuan penelitian ini, maka rancangan penelitian yang digunakan Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Asosiatif.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Iligai. Jumlah penduduk di Desa Iligai berjumlah 1.502 jiwa. Yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 716 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 786 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Iligai berjumlah 428 kepala keluarga.



Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah kepala keluarga Desa Iligasi. Sedangkan metode pengambilan sampelnya menggunakan metode Slovin (Umar, 2005:78) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n (Ukuran sampel/jumlah responden), N (Ukuran populasi), e (kesalahan dalam pengambilan sampel)

$$n = \frac{428}{1 + 428(0,10)^2}$$

$$n = \frac{428}{1 + 428(0,01)^2}$$

$$n = \frac{428}{1 + 4,28}$$

$$n = \frac{428}{5,28}$$

$$n = 81,06 \text{ dibulatkan menjadi } 82$$

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh sampel sebanyak 82. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 82 responden (n=82). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis regresi sudah memenuhi syarat-syarat. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji linearitas, dan uji normalitas data (Ghozali, 2009: 25-113).

#### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan APBDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Iliagi, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah

1. Variabel Bebas ( $X_1$ ), Pemanfaatan Dana Desa  
Diartikan sebagai dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada Desa Iligai sebagai salah satu sumber pendapatan Desa Iligai, Kecamatan Lela. Pemanfaatan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Harjono, dkk (2014) yaitu :
  - a. Pengalokasian sumber daya.
  - b. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.
2. Variabel Bebas ( $X_2$ ), APBDes  
APBDes merupakan suatu perencanaan keuangan tahunan Desa Iligai yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Iligai, Kecamatan Lela yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa Iligai, Kecamatan Lela. Indikator APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):
  - a. Pendapatan Desa
  - b. Belanja Desa
  - c. Pembiayaan Desa

3. Variabel Terikat (Y), Kesejahteraan Masyarakat

Definisi kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana masyarakat Desa Iligai dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Peningkatan kesejahteraan diukur menggunakan empat indikator menurut Bintrato (1989) yang meliputi :

- a. Kualitas hidup dari segi materi.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik.
- c. Kualitas hidup dari segi mental
- d. Kualitas hidup dari segi spiritual

**Uji Instrumen Penelitian**

Untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner sebagai alat pengumpulan data sudah baik dan tidak menimbulkan informasi yang bias sehingga layak untuk dianalisis, maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

**Analisis Deskriptif**

Untuk mengetahui gambaran Kesejahteraan Masyarakat, Pemanfaatan Dana Desa dan APBDes pada Desa Iligai, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor Aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Untuk mengategorikan nilai skor total dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Kriteria persentase tanggapan responden**

No	% Jumlah Skor	Kategori Skor
1	20.00% – 36.00%	Sangat Rendah/Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Rendah/Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4	68.01% – 84.00%	Tinggi/Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber: Narimawati, (2007: 85)

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis regresi sudah memenuhi syarat-syarat. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji linearitas, dan uji normalitas data (Ghozali. 2009: 25-113).

### Uji Parasial (Uji “t”)

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing- masing variabel bebas yaitu: variabel Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan APBDes (X2) terhadap variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat kerja (Y) digunakan uji t. Supranto (2000:61) menyatakan formulasi uji t yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Formulasi uji t

$$t_{hitung} = \frac{bi}{Sbi}$$

Keterangan : bi (Koefisien regresi), Sbi (Simpangan baku/ Standar error), Taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$

2. Kaidah Pengambilan Keputusan

- a. Jika  $\rho > \alpha$  (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya secara parsial variabel Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan APBDes (X2) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).
- b. Jika  $\rho \leq \alpha$  (0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan APBDes (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).

### Uji Simultan (Uji F)

Uji (F) bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel bebas Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan APBDes pegawai (X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat (Y). Supranto (2000:61) menyatakan formulasi uji F yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Formulasi uji t

$$F_{hitung} = \frac{JKR/(k-1)}{JKE/(n-k)}$$

Keterangan : JKR (Jumlah kuadrat regresi), JKE (Jumlah kuadrat error), n (Banyaknya responden), k (Banyaknya variabel), Taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$

2. Kaidah Pengambilan Keputusan

- a. Jika  $\rho > \alpha$  (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya secara simultan variabel Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan APBDes pegawai (X2) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).
- b. jika  $\rho \leq \alpha$  (0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak maka artinya secara simultan variabel Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan kerja pegawai (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 97).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa : (1) persentase Skor Total untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat adalah 86,12% sehingga termasuk dalam kategori sangat baik, (2) persentase Skor Aktual untuk variabel Pemanfaatan Dana Desa adalah 87,44% sehingga termasuk dalam kategori sangat baik, (3) persentase Skor Total untuk variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah 84,21% sehingga termasuk dalam kategori sangat baik.

### Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji Hipotesis secara parsial (Uji t) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu: variabel Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ ) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ( $X_2$ ) secara parsial terhadap variabel terikat Kesejahteraan kerja (Y). Hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini

**Tabel 4. Uji hipotesis parsial (Uji t)**

No	Model	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	T	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	21,258	4,629	0,000
2	Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ )	0,184	0,831	0,408
3	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ( $X_2$ )	1,039	8,079	0,000

Sumber : Hasil Analisis Data 2022

Berdasarkan analisis data pada tabel 4. di atas, uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,831 dengan nilai signifikan sebesar 0,408. Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa secara parsial variabel Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Artinya jika variabel Pemanfaatan Dana Desa semakin ditingkatkan maka Kesejahteraan Masyarakat akan meningkat dengan peningkatan yang tidak signifikan.

2. Variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ( $X_2$ ) :

Hasil uji statistik pada tabel 4.28 menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,079 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa secara parsial variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Artinya jika variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) semakin ditingkatkan maka Kesejahteraan Masyarakat akan meningkat dengan peningkatan yang signifikan.

**Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)**

Uji hipotesis secara simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel bebas Pemanfaatan Dana Desa (X1) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat (Y). Hasil analisis uji hipotesis uji F dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. Uji hipotesis simultan (Uji F)**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1924,686	2	962,343	49,027	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	1550,692	79	19,629		
	Total	3475,378	81			

*Sumber : Hasil Analisis Data 2022*

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 49,027 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka ke 2 variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), artinya naik-turunnya nilai Kesejahteraan Masyarakat sangat ditentukan oleh naik turunnya ke 2 variabel bebas dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Dana Desa (X<sub>1</sub>) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil R<sup>2</sup> yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 6. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,744 <sup>a</sup>	0,554	0,543	4,43046

*Sumber : Hasil Analisis Data 2022*

Berdasarkan Hasil Analisis Data 2022 pada tabel 6. di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,554 yang berarti bahwa ke-2 variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri atas : Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka sebesar 55,4% (diperoleh dari: 0,554 × 100%). Sedangkan sisanya sebesar 44,6% (diperoleh dari: 100% - 55,4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

**Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. Berpengaruh positif dapat diartikan bahwa apabila Pemanfaatan Dana Desa ditingkatkan dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat akan meningkat. Berpengaruh tidak signifikan dapat diartikan bahwa apabila Pemanfaatan Dana Desa ditingkatkan maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka akan meningkat dengan peningkatan yang tidak signifikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yang diajukan, yaitu : Pemanfaatan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlin & A. Nurohman (2019) dimana penelitian-penelitian tersebut mampu membuktikan bahwa pemanfaatan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. **Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. Berpengaruh positif dapat diartikan bahwa apabila Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dikelola dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat akan meningkat. Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dikelola dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka akan meningkat dengan peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang diajukan yaitu : Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh NL Azhariyah (2018) dimana penelitian tersebut mampu membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa penelitian terdahulu, Manajemen Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka perlu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatnya. Indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah Pendapatan Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa Iligai yang merupakan hak Desa Iligai dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Cara untuk memperbaiki indikator ini yaitu : sumber pendapatan Desa saat ini harus mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus melakukan upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, karang taruna, RT/RW, selalu melibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Cara untuk memperbaiki indikator tersebut adalah : penerimaan pembiayaan desa harus dapat membantu perekonomian masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat desa serta pengeluaran pembiayaan desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

### **Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka**

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara bersama-sama (simultan) dikelola dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka akan meningkat dengan peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang diajukan, yaitu: Diduga Terdapat Pengaruh signifikan Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Arjuna & Yulfan A. Nurohman (2019) dimana penelitian-penelitian tersebut mampu membuktikan pemanfaatan dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa penelitian terdahulu, Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka perlu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatnya dengan memperbaiki kedua variabel bebas yaitu Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara bersama-sama.

Pemanfaatan Dana Desa secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, namun ketika digabungkan secara simultan dengan variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memberikan dampak yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah : operasional kegiatan mendukung efiseinsi dan efektifitas (86,59). Operasioanl kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara untuk memperbaiki indikator tersebut yaitu pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara efektif, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan, efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana desa harus dilaksanakan serta penggunaan dana desa selalu menerapkan ekonomis, efektif dan efisien

## **KESIMPULAN**

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (1) persentase skor total untuk variabel Pemanfaatan Dana Desa adalah 87,44% dengan kategori sangat baik; (2) persentase skor total untuk variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah 84,21% dengan kategori sangat baik; (3) persentase skor total untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat adalah 86,12% dengan kategori sangat baik.
2. Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri (parsial)
  - a. Variabel Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. Apabila variabel Pemanfaatan Dana Desa ditingkatkan maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka akan meningkat dengan peningkatan yang tidak signifikan
  - b. Variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. Apabila variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kerja ditingkatkan maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka akan meningkat dengan peningkatan yang signifikan.

3. Hasil statistic uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel bebas yang terdiri dari Pemanfaatan Dana Desa ( $X_1$ ) dan variabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. Dengan demikian, meningkatkan kedua variabel bebas ini secara bersama-sama akan berdampak terhadap meningkatnya variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.
4. Hasil analisis determinasi menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka sebesar 55,4%. Sedangkan sisanya sebesar 44,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka disarankan untuk :
  - a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memperbaiki Pemanfaatan Dana Desa. Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka harus operasional dalam mendukung kegiatan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan, efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana desa harus dilaksanakan serta penggunaan dana desa selalu menerapkan ekonomis, efektif dan efisien.
  - b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memperbaiki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka harus melakukan upaya yang keras untuk meningkatkan pendapatan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, karang taruna, RT/RW, selalu melibatkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa. Serta penerimaan pembiayaan desa harus dapat membantu perekonomian masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.
2. Kepada peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian serupa, disarankan untuk melibatkan variabel lain yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat yang belum diikut sertakan dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Pemerintahan Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka dalam pengambilan keputusan



## REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan pendapatan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi. (2016). *Akuntansi dalam perspektif pengelolaan keuangan desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A Friedlander, Walter. (1961). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arjuna, Iskandar. (2019). *Pengaruh pengelolaan dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanak Rarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Arikunto. (2001). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asoka. (2018). *Menuju partisipasi masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ating & Sabas. (2006). *Aplikasi Statistika dalam penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Bappenas. (2000). *Sistem informasi manajemen pembangunan di pedesaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bintrato. (1989a). *Indikator kesejahteraan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (1989b). *Interaksi desa, kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cronbach. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test. *Psychological Bulletin*. 52:281-302
- Faridah & Bambang Suryono. (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4(5):1-19
- Fahrudin. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ghozali. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Harjono, Kurniawati & Pahala (2014). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran. *Binus Business Review*. 5(2):537-550.
- Hasan. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herliani, (2019). *Pengaruh Manfaat Alokasi Dana Desa, Manfaat Dana Desa dan kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan masyarakat (di desa Uteun Pulo, kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. 1(01)
- Husein,Umar. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Kello. (1974). *Kesejahteraan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Keuangan. 2017. Dana Desa
- Landis, Paul, H. (2012). *Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Letik, Andreas. (2019). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 9(01): 21-42.
- Lili. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura*. 12(5):24-30
- Midgley. (2005). *Pembangunan sosial, perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: Diperta Islam.
- Narimawati. (2007). *Riset manajemen sumber daya manusia aplikasi contoh dan perhitungan*. Jakarta: Agung Media.
- Nasikun. (1993). *Sistem sosial indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Noerdiawan. (2010). *Akuntansi sektor publik edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat

- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurohman. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat (studi Kasus pada desa wisata Menggoro). *Jurnal Magisma: Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.7(1):35-43
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pasal 1 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan aset desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pasal 1. tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 Pasal 1. tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prioritas Dana Desa berdasarkan PERMENDESA PD TT 13 Tahun 2020.
- P3M. OTDA. 2002. Langkah-langkah penyusunan APBDes.
- Rahayu, Depi. (2017). Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalikayan Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*. 6(2):65-72
- Ridwan. (2009). *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Setiaji. (2004). *Panduan riset dengan pendekatan kuantitatif*. Surakarta: Program Pascasarjana UMS.
- Setyawati, Sulis. (2017). Efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJurnal Administrasi Negara*. 5(3):21-40
- Soetomo. (2013). *Masalah sosial dan upaya penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam prespektif masyarakat lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto. (2007a). Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan desa benua baru ilir berdasarkan indikator badan pusat statistik. *Jurnal EPP*.4(2): 32-36.
- \_\_\_\_\_. (2007b). *Faktor-faktor hipertensi grade II pada masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet., XIV* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010a). *Metode penelitian administratif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2010b). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Statistik non parametrik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013a). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015a). *Metode penelitian kombinasi (mix mehtods)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015b). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono & Susanto. (2015). *Cara mudah belajar SPSS dan lisrel*. Bandung: Alfabeta.
- Sukesi. (2007). Efektivitas alokasi dana desa dan kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1):29-41
- Sumpeno. (2011a). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.
- \_\_\_\_\_. (2011b). *Perencanaan desa terpadu (edisi kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Sumpeno. (2013). *Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDes*. Jakarta: Grasindo.
- Supranto. (2000). *Teknik sampling untuk survei dan eksperimen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supranto. (2006a). *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. (2006b). *Mengukur Tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar. (2003a). *Metode riset perilaku konsumen jasa*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2003b). *Riset sumber daya manusia dalam organisasi*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Umar. (2005). *Metode penelitian untuk tesis dan bisnis*. Jakarta: Grafindo.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014. Dana Desa.
- Undang-Undang Pasal 1 PP 8/2016. Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Desa.
- Uyanto. (2009). *Pedoman analisis data dengan SPSS*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja. (2003). *Otonomi desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.